



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan juga tertuang dalam dokumen ini beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Penyusunan RENSTRA ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181), RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 19 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19729227 199103 1 001



DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025	ii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	II-4
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-8
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-21
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan	II-21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.2.2 Isu Strategis	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	III-1
3.2 Sasaran dan Arah Kebijakan	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-49
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-51
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan Substansial	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan	II-5
Tabel 2.2	Komposisi Jabatan Fungsional	II-5
Tabel 2.3	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-5
Tabel 2.4	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-6
Tabel 2.5	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-7
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup..	II-7
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.8	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.10	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-12
Tabel 2.11	Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/ atau Kegiatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.12	Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2.13	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....	II-16
Tabel 2.14	Rasio antara Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.16	Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024	II-19
Tabel 2.18	Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan	II-22
Tabel 2.19	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional	II-23
Tabel 2.20	Teknik menyimpulkan Isu Strategis DLH	II-27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	III-3
Tabel 3.2	Tahapan Rencana Strategis	III-5
Tabel 3.3	Rumusan Arah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	III-7
Tabel 3.4	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ...	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	IV-20
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-46



Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DLH	IV-50
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	IV-34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.....	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-6
Gambar 2.3	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-6
Gambar 2.4	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-7
Gambar 2.5	Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024.....	II-10
Gambar 2.7	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-10
Gambar 2.8	Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-17
Gambar 4.1	Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	IV-48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pasca pemilihan kepala daerah serentak, dimana Bupati/Walikota memerintahkan kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 27 November 2024, Kabupaten Karanganyar menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2025–2030. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, pasangan Rober Christanto, S.E., M.M. dan Adhe Eliana, S.E. ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk periode tersebut dan resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagai kepala daerah terpilih, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2025. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJMD dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJPD dan RTRW yang dipedomani, serta memperhatikan dokumen KLHS RPJMD.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 107).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029:

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
- b. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun ke depan.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang :

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang :

- 3.1. Tujuan Renstra DLH Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi DLH
- 3.4. Arah Kebijakan DLH

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

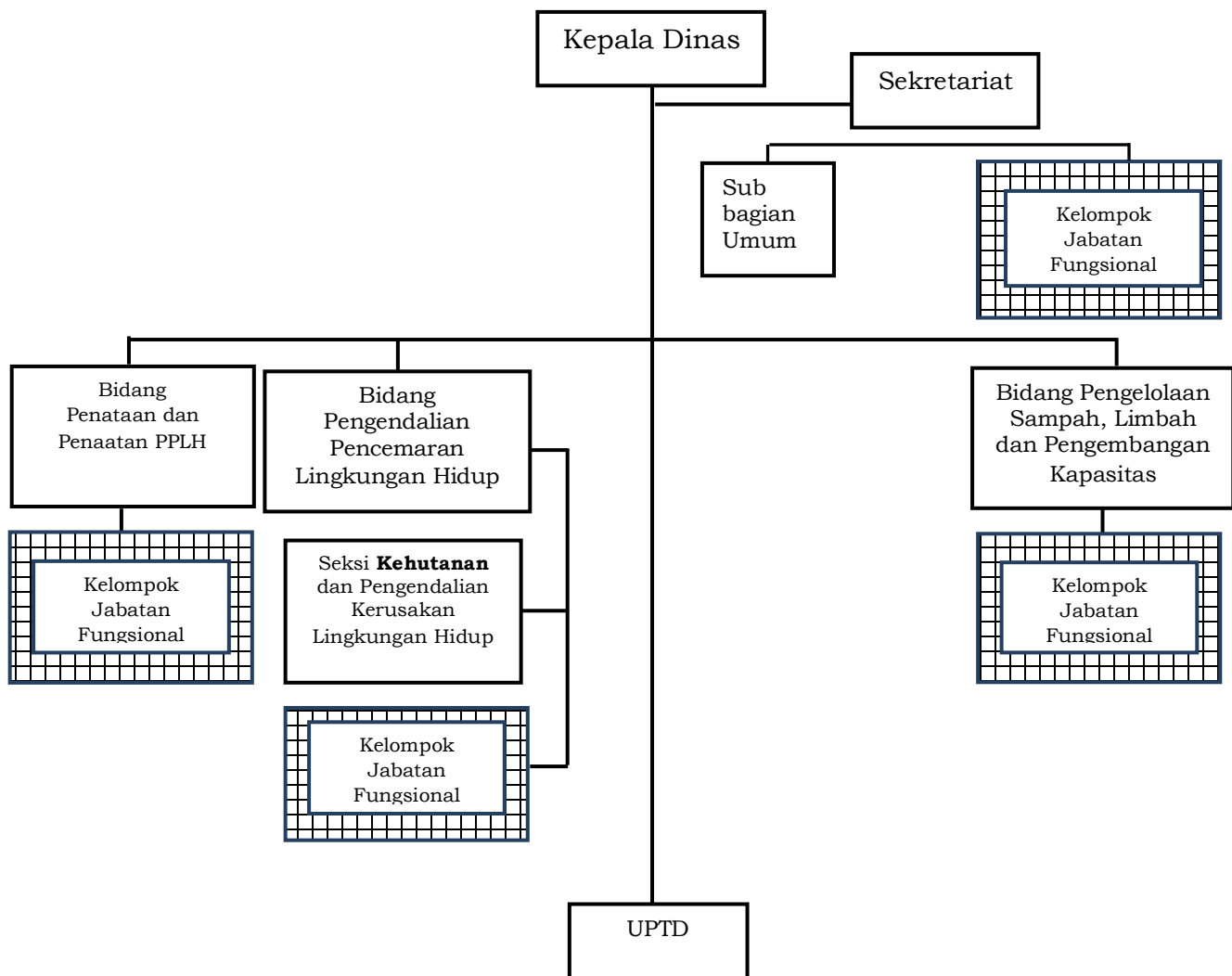
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) khususnya bidang kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;



- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merupakan unsur pelaksana Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, penaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

Merupakan unsur pelaksana Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan



Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas.

Merupakan unsur pelaksana Pengelolaan Sampah Limbah dan Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang pengelolaan sampah, limbah dan pengembangan kapasitas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/ Sekretaris. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 199 orang, dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan.



1) Pejabat Struktural

Jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), 4 jabatan administrator (eselon III) dan 2 jabatan administrasi pengawas (eselon IV). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Terisi
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1
2	Administrator	4	3
3	Pengawas	2	1
Jumlah		7	5

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024

2) Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 65 orang. Jumlah ini terdiri dari 48 orang sebagai fungsional umum dan 17 orang sebagai fungsional tertentu. Formasi jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Komposisi Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	48
2	Jabatan Fungsional Tertentu	17
	- Pengendali Dampak Lingkungan	12
	- Pengawas	1
	- Perencana	1
	- Analis Kebijakan	1
	- Penyuluh Lingkungan	1
	- Pranata Komputer	1
Jumlah		65

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

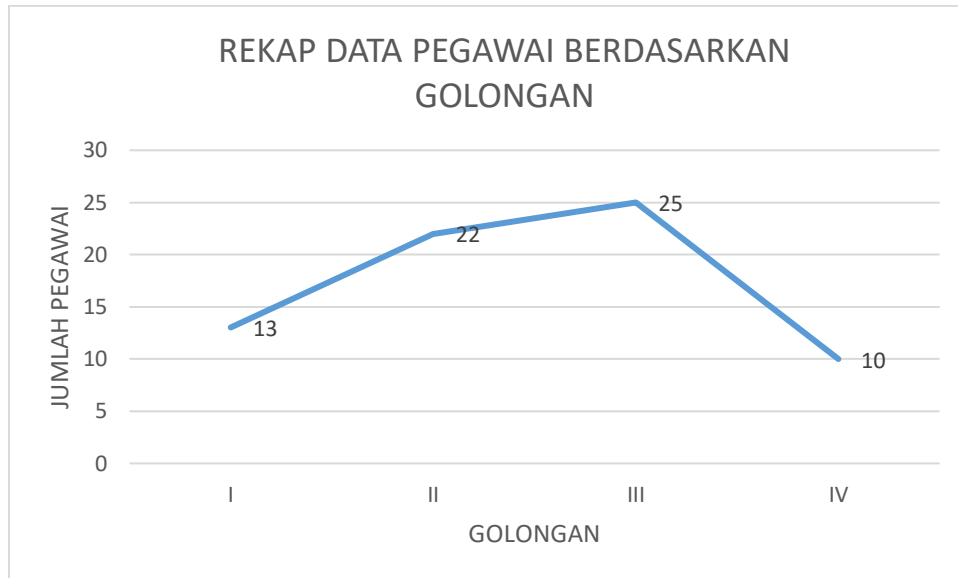
Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berstatus sebagai tenaga harian lepas (THL). Pegawai ASN berjumlah 70 orang dan pegawai yang berstatus THL sebanyak 129 orang. Formasi kepegawaian berdasarkan golongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.3

Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	70
	Golongan IV	10
	Golongan III	25
	Golongan II	22
	Golongan I	13
2	Pegawai/ Tenaga Harian Lepas	129
Jumlah		199

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

4) Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

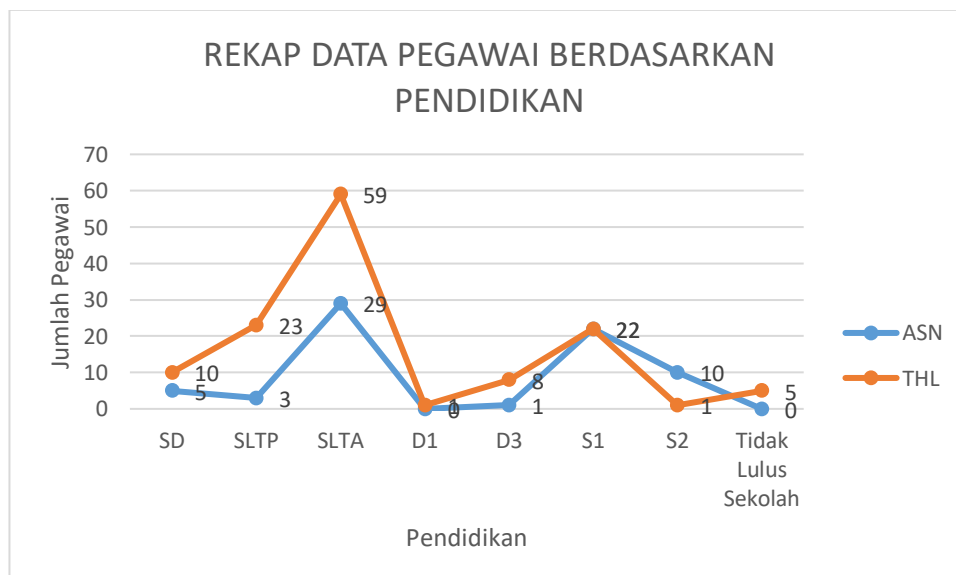
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.4

Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	THL
1.	SD	5	10
2.	SLTP	3	23
3.	SLTA	29	59
4.	D1	0	1
5.	D3	1	8
6.	S1	22	22
7.	S2	10	1
8.	Tidak Lulus Sekolah	0	5
JUMLAH		70	129

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024



Gambar 2.3 Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



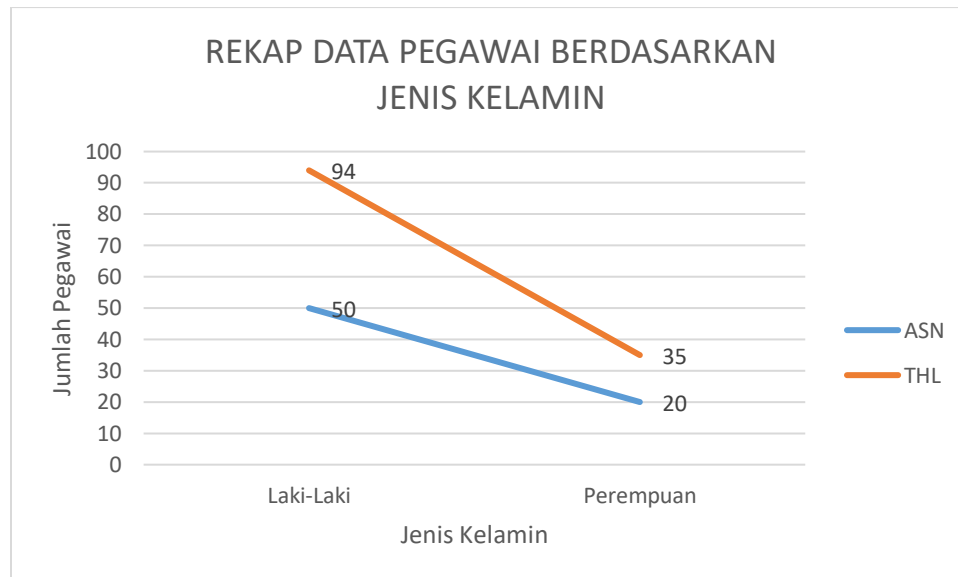
5) Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.5
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	THL
1.	Laki-Laki	50	94
2.	Perempuan	20	35
JUMLAH		70	129

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024



Gambar 2.4 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya yang menjadi barang inventaris. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Tahun 2024
1.	Tanah	12
2.	Alat-alat besar	5
3.	Alat-alat angkutan	62
4.	Alat Bengket dan Alat Ukur	12
5.	Alat Pertanian	0
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	580
7.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	32
8.	Alat Laboratorium	631
9.	Bangunan Gedung	22



No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Tahun 2024
10.	Monumen	0
11.	Jalan dan Jembatan	6
12.	Bangunan Air/ Irigasi	5
13.	Instalasi	3
14.	Jaringan	3
15.	Buku dan Perpustakaan	8
16.	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0
17.	Konstruksi dalam pengerjaan	3
TOTAL		1384

Sumber : Subbag Umum DLH Karanganyar, 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin medesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi over capacity yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

a. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat diukur menggunakan capaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

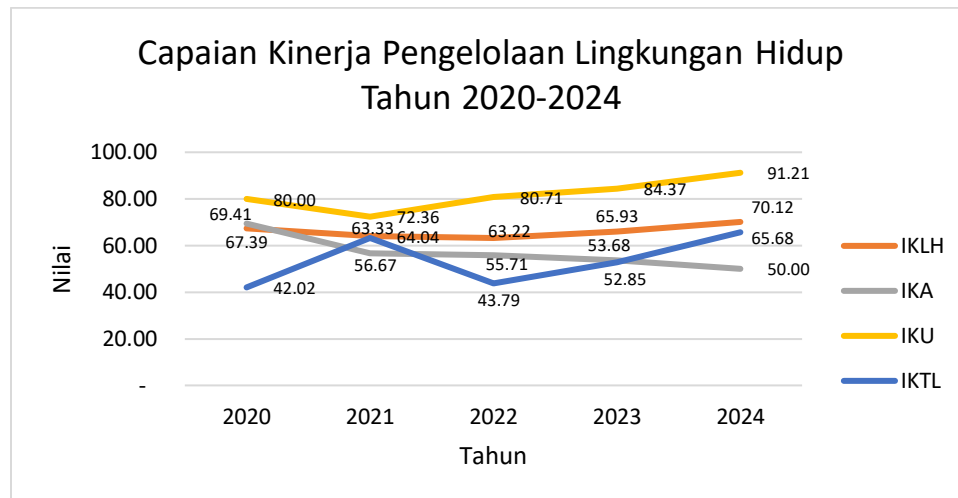
Capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 67,39 menjadi 70,12, hanya saja untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya permasalahan lingkungan seperti tekanan aktivitas manusia dan kurang optimalnya program pelestarian. Besaran IKLH dipengaruhi oleh indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Nilai masing-masing indeks di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	67,39	64,04	63,22	65,93	70,12
Indeks Kualitas Air	69,41	56,67	55,71	53,68	50
Indeks Kualitas Udara	80,00	72,36	80,71	84,37	91,21
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,02	63,33	43,79	52,85	65,68

Sumber : DLH Karanganyar, 2024

Grafik Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut ini :

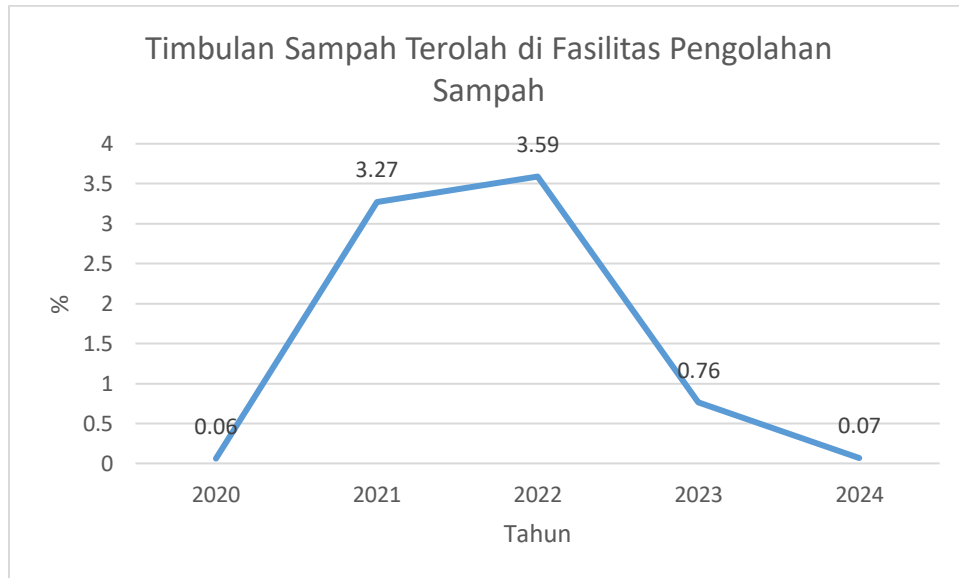


Gambar 2.5.

Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari pengelolaan sampah. Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah Kabupaten Karanganyar, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pembuangan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pembuangan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA.

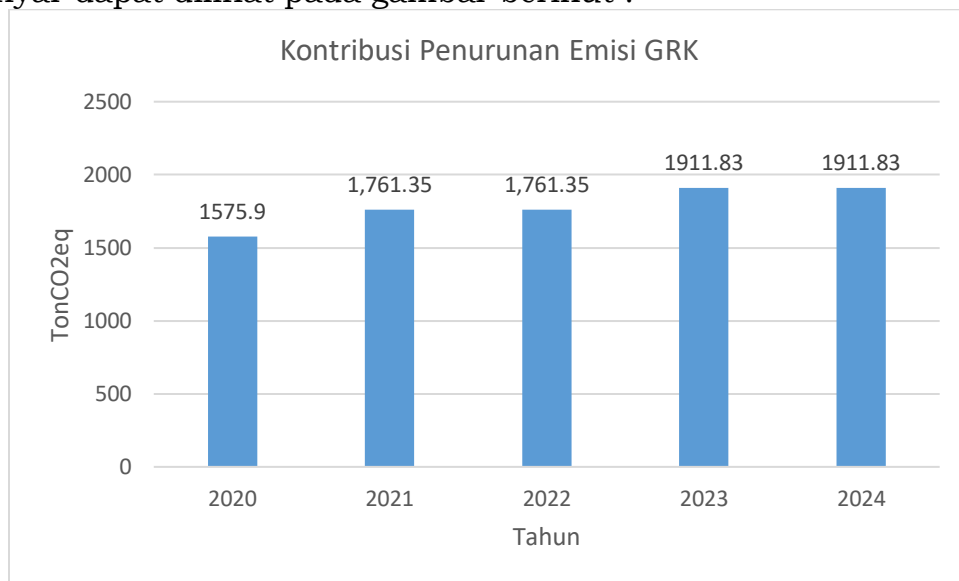
Data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Karanganyar menunjukkan perkembangan persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase sampah terolah sangat rendah yaitu hanya 0,06%, namun mengalami lonjakan signifikan menjadi 3,27% pada 2021 dan mencapai titik tertinggi pada 2022 sebesar 3,59%. Namun demikian, tren ini tidak berlanjut, karena pada 2023 persentasenya menurun drastis menjadi 0,76%, dan kembali turun menjadi 0,07% pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam sistem pengelolaan sampah di daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas fasilitas, kendala teknis, atau penurunan dukungan operasional, minimnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya sistem pengumpulan serta pengangkutan sampah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar sistem pengelolaan sampah menjadi lebih berkelanjutan dan efektif.



Gambar 2.6.

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024

Penurunan emisi GRK di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 1.575,90 TonCO₂eq, kemudian meningkat di tahun 2024 menjadi 1.911,83 TonCO₂eq. Selengkapnya terkait penurunan emisi GRK di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.7.

Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (TonCO₂eq)

Capaian pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang perlahan namun positif, khususnya dalam pengelolaan sampah dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sempat mengalami penurunan dari 67,39 pada tahun 2020 ke angka terendah 63,22 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, IKLH meningkat signifikan menjadi 70,12, yang menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Perbaikan ini bisa mencerminkan hasil dari berbagai intervensi atau program lingkungan yang dijalankan pemerintah daerah. Data selengkapnya terangkum dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.8 Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Urusan	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	67,39	64,04	63,22	65,93	70,12
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	69,41	56,67	55,71	53,68	50,00
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	80,00	72,36	80,71	84,37	91,21
	- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai	42,02	63,33	43,79	52,85	65,68

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terdiri dari 9 indikator antara lain : 1) Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup, 2) Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara), 3) Luasan ruang terbuka hijau, 4) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya, 5) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, 6) Persentase Sekolah Adiwiyata, 7) Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH, 8) Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti, dan 9) Persentase timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Capaian urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	%	Na	37,5	50	73,7	50
3	Luasan ruang terbuka hijau	ha	Na	Na	3.591,26	3.973,01	3.982,55
4	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	%	70	74	72	77	77,5
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	70,5	74,2	72,9	76,6	76,9
6	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	Na	Na	Na	Na	0
7	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	%	60	55	50	52	50



No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
9	Persentase timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0,06	3,27	3,59	0,76	0,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2024

Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, antara lain :

1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Penurunan kualitas udara ambien akibat dampak negatif dari pembangunan karena adanya peningkatan sumber pencemar udara. Penurunan kualitas udara ambien ini memerlukan upaya pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara ambien.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada beberapa titik lokasi yang strategis dengan berbagai peruntukkan dan pengukurannya dilakukan secara sesaat. Pengukuran secara sesaat dilakukan pada jalan raya dengan kategori padat lalu lintas, pada daerah perdagangan, daerah dekat permukiman dan daerah dekat industri.

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran udara serta untuk mengetahui kondisi kualitas udara dan kecenderungannya. Adapun pemantauan kualitas udara ambien yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Pemantauan Kualitas Udara ambien di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu	Prosentase Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu $(3)/(4) \times 100\%$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	4	4	100%
2	2021	4	4	100%
3	2022	4	4	100%
4	2023	4	4	100%
5	2024	12	12	100%

2) Pemantauan Kualitas Air Limbah

Pelayanan pencegahan pencemaran air merupakan bentuk pelayanan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan



penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu kegiatan/usaha adalah ditaatinya persyaratan administrasi dan teknis oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke lingkungan. Persyaratan administrasi berkaitan dengan penerbitan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke sumber air di mana setiap usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke sumber air harus memiliki izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan, dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Setiap usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis adalah yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah limbah sehingga limbah yang akan dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu. Persyaratan teknis ini terdiri atas upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilaksanakan dengan pengambilan contoh air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi kegiatan domestik, hotel, rumah sakit dan kegiatan industri.

Adapun upaya pemantauan kualitas air limbah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jml Usaha dan/atau Keg. yang Mentaati Persy Adm dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Jml Usaha dan/atau Keg. Yang Dipantau	Prosentase Jml Usaha dan/atau Keg. Yg Mentaati Persy Adm & Teknis Pencegahan Pencemaran Air (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	35	35	100%
2	2021	31	35	88.57%
3	2022	24	35	68.57%
4	2023	28	28	100%
5	2024	25	25	100%

3) Pengaduan lingkungan yang ditangani

Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup. Meningkatnya pengaduan masyarakat didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya kepada bupati atau kepala instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten melalui bupati atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi :

- Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota
- Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.
- Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota.

Sebagai tanggung jawab pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Pos Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat terkait adanya permasalahan lingkungan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari 21 pengaduan kasus lingkungan pada tahun 2020 menjadi 42 pengaduan pada tahun 2024 yang seluruhnya dapat ditangani (100%).

Peningkatan kasus pengaduan lingkungan hidup tidak mencerminkan bahwa lingkungan di Kabupaten Karanganyar semakin buruk, namun hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin tinggi. Adapun jumlah pengaduan kasus lingkungan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	21	21	100%
2	2021	23	23	100%
3	2022	27	27	100%



No	Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) x 100%
4	2023	29	29	100%
5	2024	42	42	100%

b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan

Kinerja anggaran dan pendapatan adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran dan capaian pendapatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran dan pendapatan merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dan pendapatan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi juga berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan alokasi anggaran.

1) Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menyumbang pendapatan asli daerah melalui pos retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan retribusi pemakaian laboratorium.

Pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan sebesar 468,16%. Pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 333.954.920,- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.563.446.300,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.229.491.380,-. Kenaikan yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya Perda Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif retribusi kebersihan mengalami kenaikan yang signifikan, selain itu adanya potensi jumlah yang tidak dapat diprediksi pada objek retribusi seperti ritase, tempat wisata yang tergantung dari jumlah pengunjung, event dan proyek fisik menjadi faktor meningkatnya realisasi pendapatan.

Sedangkan untuk retribusi pemakaian laboratorium baru muncul pada tahun 2022, dengan dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun 2022 tentang retribusi jasa usaha, yang kemudian diganti dengan Perda No. 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pendapatan asli daerah Dinas Lingkungan Hidup bertambah 1 (satu), yaitu dari retribusi pemakaian laboratorium. Target pendapatan retribusi pemakaian laboratorium ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-. Capaian realisasi retribusi pemakaian laboratorium tahun 2022 telah melebihi target yaitu sebesar Rp. 22.740.000,-, begitu juga di tahun 2024 sebesar Rp. 37.395.000,-. Dengan adanya retribusi pemakaian laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

Target dan realisasi pendapatan selama tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut :

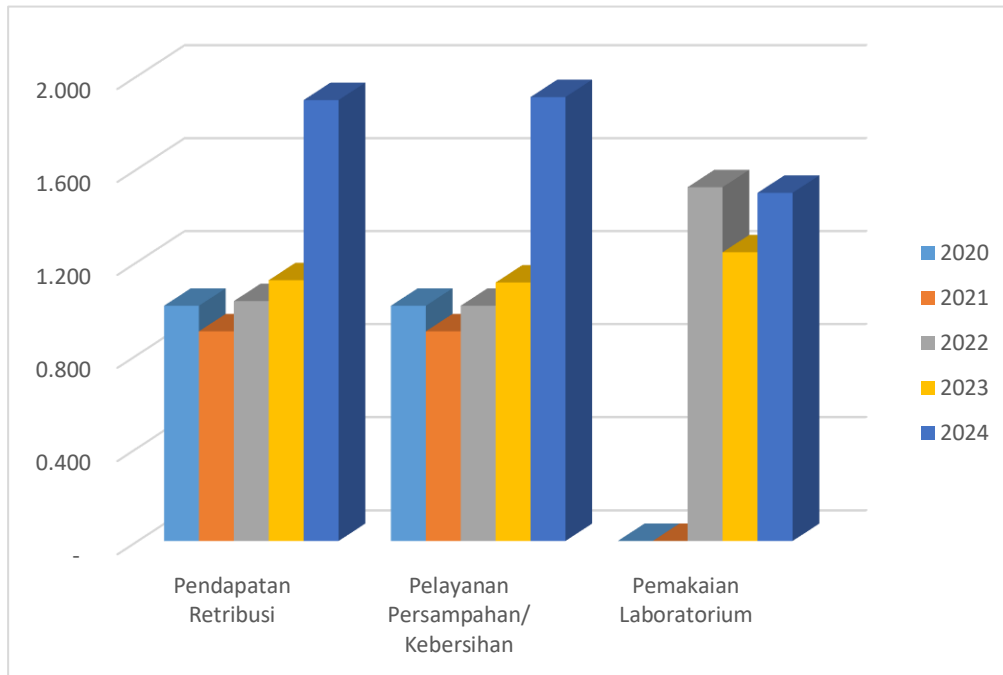


Tabel 2.13.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Uraian	Target pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Retribusi	329.656.000	375.080.000	392.800.000	417.500.000	825.000.000	333.954.920	338.319.210	402.999.240	467.196.160	1.563.446.300
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	329.656.000	375.080.000	377.800.000	392.500.000	800.000.000	333.954.920	338.319.210	380.259.240	436.161.160	1.526.051.300
Pemakaian Laboratorium			15.000.000	25.000.000	25.000.000			22.740.000	31.065.000	37.395.000

Tabel 2.14.
Rasio antara Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Uraian	Target pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Retribusi	1,01	0,90	1,03	1,12	1,895
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,01	0,90	1,01	1,11	1,908
Pemakaian Laboratorium			1,52	1,24	1,496



Gambar 2.8. Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2) Belanja

Dukungan anggaran sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup. Anggaran belanja dan realisasi anggaran tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.15.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	14.861.996.000	13.685.643.325	14.476.989.400	16.107.159.620	16.342.875.406	13.885.868.919	13.356.551.991	13.839.219.272	15.420.956.955	15.794.655.116
Belanja Pegawai	8.160.195.000	7.352.350.000	7.477.656.000	7.408.454.220	7.401.088.556	7.330.381.046	7.119.902.919	6.962.840.856	6.902.214.095	7.075.075.768
Belanja Barang dan Jasa	6.593.801.000	6.333.293.325	6.999.333.400	8.698.705.400	8.941.786.850	6.452.537.873	6.236.649.072	6.876.378.416	8.518.742.860	8.719.579.348
Belanja Hibah	108.000.000	0	0		0	102.950.000	0	0	0	0
Belanja Modal	226.450.000	600.915.675	724.712.600	1.179.790.600	3.625.737.750	223.703.000	590.307.500	680.001.800	1.159.865.910	3.601.924.027
Modal Peralatan dan Mesin	226.450.000	244.682.500	295.000.000	1.179.790.600	2.761.037.750	223.703.000	242.539.000	276.392.400	1.159.865.910	2.750.614.107
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	404.712.600	0	859.800.000	0	0	378.609.400	0	846.409.920
Modal Gedung dan Bangunan	0	355.233.175	25.000.000	0	0	0	346.845.000	25.000.000	0	0
Modal Aset Tetap Lainnya	0	1.000.000	0	0	4.900.000	0	923.500		0	4.900.000
JUMLAH	15.088.446.000	14.286.559.000	15.201.702.000	17.286.950.220	19.968.613.156	14.109.571.919	13.946.859.491	14.519.221.072	16.580.822.865	19.396.579.143

Tabel 2.16.
Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	0,93	0,98	0,94	0,96	0,97
Belanja Pegawai	0,90	0,97	0,93	0,93	0,96
Belanja Barang dan Jasa	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Belanja Hibah	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,99	0,98	0,94	0,98	0,99
Modal Peralatan dan Mesin	0,99	0,99	0,94	0,98	0,99
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,94	0,00	0,98
Modal Gedung dan Bangunan	-	0,98	1,00	0,00	0,00
Modal Aset Tetap Lainnya	-	0,92	-	0,00	1,00
Total Belanja	0,92	0,90	0,94	0,96	0,97



Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.240.586	8.390.241,5	9.611.144,22	10.033.610,156	7.980.737	7.860.485.722	9.067.324,117	9.633.224,412	96.85	93.69	94.34	96.01
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	268.125	212.585	600.000	275.000	264.316,6	211.014,92	514.594,2	273.286.975	98.58	99.26	85.77	99.38
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	586.130	839.535	1.098.788	1.707.003	572.226.351	801.972.359	1.092.336,8	1.687.008,474	97.63	95.53	99.41	98.83
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	58.412	47.465	125.000	160.000	57.598	46.955	121.707,25	155.418,6	98.61	98.93	97.37	97.14
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	65.555,9	199.000	100.000	130.000	60.782,65	193.089,35	99.984,956	128.962,75	92.72	97.03	99.98	99.20



No	Program	Rencana Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	125.700	119.396,5	128.000	118.000	116.011	119.241,4	125.245,65	117.645,1	92,29	99,87	97,85	99,70
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.223,3	228.500	168.500	93.500	49.009,2	225.041,5	166.913,3	93.200,15	97,58	98,49	99,06	99,68
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	24.426,7	31.387,4	23.000	18,000	23.776,7	30.994,9	19.768,9	17.319	97,34	98,75	85,95	96,22
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.137,5	30.850	23.000	20.000	24.778	30.815	22.997,15	19.997,6	82,22	99,89	99,99	99,99
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	4.576.519,9	4.932.757	5.409.518	7.383.500	4.538.037,125	4.829.651,773	5.072.001,946	7.241.896,557	99,16	97,91	93,76	98,08
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya				30.000				28.619,525				95,40



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan kepada beberapa kelompok, antara lain :

1. Masyarakat
2. Pelaku usaha
3. Kelompok/Lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan
4. Pemerintah Desa

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam urusan Lingkungan Hidup yaitu DPUPR, Baperlitbang, Disdagperinaker, Dispermades, Disparpora, Disdikbud dan Diskuktransesdm.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil/ menengah/ besar di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Karanganyar, Penurunan kualitas lingkungan terutama kualitas air sungai disebabkan oleh masuknya limbah yang bersumber dari limbah domestik, pertanian dan peternakan. Selain itu sektor industri besar/ menengah/ kecil juga berkontribusi menyumbang pencemaran. Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi-inovasi secara terus-menerus dalam upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.
4. Belum optimalnya penanganan sampah baik di hulu maupun di hilir Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2024 sebesar 40%.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka



panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Penentuan isu strategis Perangkat Daerah perlu memperhatikan isu global, isu nasional dan isu regional yang kemudian dibandingkan dengan permasalahan yang ada di daerah, seperti berikut ini :

a. Isu Strategis Global

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (*global megatrend*), yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait pemenuhan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geopolitik	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan baru dengan pemanfaatan TIK.
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada diperkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya kelompok kelas menengah pada Tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumber Daya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, nergi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan



No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
		tenaga surya dan tenaga bayu/angin/ gelombang laut.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

b. Isu Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

Tabel 2.19.

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi : belum meratanya akses mendapatkan pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none">a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggib. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannyac. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutanb. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijauc. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none">a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

c. Isu Kewilayahan Jawa Bali dari Evaluasi Pembangunan

1. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah karena persebaran pembangunan ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai dan polusi udara akibat industri.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.



6. Belum optimalnya upaya penanganan kemiskinan dalam menggarungi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.
- d. Isu Jangka Menengah Nasional
1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia.
 2. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.
 3. Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level Global.
 4. Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan
 5. *Ageing population* negara maju.
- e. Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah
- Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:
1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
 2. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
 3. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
 4. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
 5. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat
 6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis
- f. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karanganyar
- Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:
1. SDM *Equity* dan Inklusi
 2. Pertumbuhan Ekonomi
 3. Tingkat Pengangguran
 4. Kemiskinan
 5. Tata Kelola Pemerintahan
 6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana
 7. Kondusivitas
- g. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar
- Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :
1. Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 2. Rendahnya penyediaan infrastruktur;
 3. Peningkatan angka Kemiskinan;
 4. Penurunan kualitas pelayanan kesehatan;
 5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi;
 6. Penurunan Ketahanan Pangan;
 7. Pencemaran lingkungan (limbah industry, limbah domestik);
 8. Persampahan; dan
 9. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.
- h. Isu strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :
1. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan;
 2. Kemiskinan;
 3. Kualitas SDM yang Berkarakter;
 4. Tata kelola pemerintahan;
 5. Pertumbuhan ekonomi;
 6. Kondusivitas wilayah;
- Berdasarkan analisis permasalahan, potensi, tantangan nasional, isu KLHS regional, dan daerah, berikut tabel kerja perumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup :



Tabel 2.20.
Teknik menyimpulkan Isu Strategis DLH

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup - Tersedianya tempat pengolahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengendalian alih fungsi lahan yang mempertimbangkan pada ancaman kerusakan alam - Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan - Semakin menurunnya kualitas lingkungan - Belum optimalnya penanganan sampah di hulu dan di hilir 	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	Perubahan Iklim Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/gelombang laut.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana	Alih fungsi lahan; penurunan kualitas lingkungan, belum optimalnya penanganan sampah di hulu dan hilir; Perubahan iklim



Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, isu strategis urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terjadinya alih fungsi lahan

Perubahan alih fungsi lahan dipicu dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga masyarakat menginginkan pembangunan wilayah seperti wilayah wisata di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, meningkatnya investor yang membuka rumah makan serta tempat-tempat di sekitar wisata juga mempengaruhi perubahan alih fungsi lahan. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan yang terjadi dapat dirasakan dengan perubahan ruang kawasan. Kawasan yang dahulunya hijau sedikit demi sedikit diperuntukkan menjadi pemukiman dan tempat wisata (termasuk di dalamnya hotel, penginapan, dan rumah makan) seiring dengan kebutuhan.

2. Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan

Kondisi atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia serta usaha dan/atau kegiatan baik industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Semakin tinggi aktivitas mengakibatkan semakin tingginya beban pencemaran sehingga mempengaruhi kondisi atau kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah.

3. Penanganan sampah di hulu dan hilir yang belum optimal

Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup serta belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari segi pelayanan persampahan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak tidak hanya terhadap kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, menurunnya ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**”. Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah serta pelestarian budaya daerah
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut;
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - 2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;



- 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
 - 2) Meningkatnya riset dan inovasi
 - 3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
 - 4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan
4. Tujuan 4 Meningkatnya pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah di atas, Dinas Lingkungan Hidup mengintervensi tujuan daerah kedua dengan sasaran daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah. Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu;
2. Meningkatnya kualitas udara;
3. Meningkatnya kualitas lahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, diperoleh penjabaran seperti yang tertera pada tabel berikut :



Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air			Angka	50	69,32	69,42	69,52	69,62	69,72	69,82
				Meningkatnya kualitas air memenuhi baku mutu	Persentase kualitas air yang sesuai baku mutu	%	13,04	13,22	14,33	15,37	16,41	17,45	18,49
			Indeks Kualitas Udara			Angka	91,21	84,61	84,62	84,63	84,64	84,65	84,66
				Meningkatnya kualitas udara	Persentase kualitas udara yang terpantau	%	8,11	8,27	8,73	9,19	9,65	10,11	10,57
			Indeks Kualitas Lahan			Angka	65,68	55,12	55,14	55,16	55,18	55,20	55,22
				Meningkatnya kualitas lahan	Luasan tutupan lahan	ha	55.155,34	55.255	55.455	55.655	55.855	56.055	56.255
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			Angka	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5
				Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0,07	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
				Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Angka	87	87,2	87,3	87,4	87,5	87,6	87,7

Sumber data : target IKA, IKU, IKL dari Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor Sk 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas air yang memenuhi baku mutu
 1. Melaksanakan pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
 3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
 4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan
 5. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
- b. Sasaran 2 Meningkatkan kualitas udara
 1. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
 2. Meningkatkan penanaman pohon di daerah kritis
- c. Sasaran 3 Meningkatkan kualitas lahan
 1. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui peningkatan ruang terbuka hijau
 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi
 3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
- d. Sasaran 4 Meningkatkan pengelolaan sampah
 1. Melakukan penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber
 2. Memperkuat peran bank sampah, TPS/TPS3R/PDU sebagai fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R untuk sarana edukasi pemilahan, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular
 3. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing
 4. Mendorong pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam PermenLHK Nomor 75 Tahun 2019 khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi hotel, restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga; dan ritel yang meliputi pusat perbelanjaan, toko, modern, dan pasar rakyat
 5. Melakukan penanganan sampah di hilir meliputi perbaikan sistem pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dengan penerapan sistem terpilah dan terjadwal, penataan pengolahan sampah di TPA dengan pembangunan RDF Plant dan memperbaiki sistem operasional TPA dari open dumping menjadi LUR dimana hanya residu yang tidak dapat diolah yang dibuang ke TPA
- e. Sasaran 5 Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi
 2. Meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup.



Tabel 3.2.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Internalisasi peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perwujudan Masyarakat Peduli lingkungan hidup	Perwujudan Peningkatan kualitas lingkungan hidup
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup 2. Pemetaan kebutuhan pelatihan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3. Pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup 4. Penyusunan rencana pengadaan sarpras 5. Mengidentifikasi mitra dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Sekolah Adiwiyata 2. Sosialisasi pemberian sanksi administrasi dan denda terkait pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan 3. Pelatihan kepada pegawai (JFU, JFT dan petugas lapangan) dan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Penyusunan rencana kebijakan pengelolaan sampah 5. Uji coba RDF Plant 6. Koordinasi dengan mitra dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan 2. Pelatihan penggunaan dan perawatan sarana prasarana 3. Implementasi rencana kebijakan pengelolaan sampah 4. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di hulu dan di hilir 5. Evaluasi kontribusi mitra dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan masyarakat peduli lingkungan 2. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3. Pembinaan bank sampah dan TPS3R 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana 5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup 6. Melakukan penguatan terhadap mitra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Desa mandiri Sampah 2. Peningkatan kualitas air, udara dan lahan 3. Pembentukan Kampung Iklim 4. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang taat mengelola lingkungan hidup



Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Melakukan penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
23. Melaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
25. Mendorong terbentuknya program kampung iklim di desa-desa
26. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
27. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
28. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
29. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
32. Meningkatkan peran serta produsen khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman dalam pengurangan sampah
33. Meningkatkan luasan lahan untuk pengelolaan sampah (sanitary landfill)
34. Meningkatkan pemanfaatan TPS3R dan pembangunan RDF Plant di TPST
35. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dari sumbernya
36. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan penatausahaan keuangan



37. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
38. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
39. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
40. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Rumusan Arah Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan; 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; 3. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin 4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan 7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui program Proper 10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan 11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu 13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 	



No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			<ol style="list-style-type: none">15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air19. Melakukan penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada23. Melaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim25. Mendorong terbentuknya program kampung iklim di desa-desa26. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan27. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup28. Mendorong terciptanya percontohan atau <i>pilot project</i> pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat29. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan32. Meningkatkan peran serta produsen khususnya bidang usaha jasa makanan dan	



No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			minuman dalam pengurangan sampah 33. Meningkatkan luasan lahan untuk pengelolaan sampah (sanitary landfill) 34. Meningkatkan pemanfaatan TPS3R dan pembangunan RDF Plant di TPST 35. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dari sumbernya 36. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan penatausahaan keuangan 37. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan 38. Perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 39. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 40. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan	

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan visi dan misi RPJMD Karanganyar tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera			
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah	Meningkatkan kualitas air yang memenuhi baku mutu	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian pencemaran oleh kegiatan industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 	



Visi RPJMD	SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>yang memiliki persetujuan lingkungan/ persetujuan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan • Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan • Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) • Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan • Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan • Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu • Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
	Meningkatkan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim • Menurunkan emisi gas rumah kaca • Meningkatnya penanaman pohon di daerah kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim • Melaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Mendorong terbentuknya program kampung iklim di desa-desa • Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
	Meningkatnya kualitas lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui peningkatan ruang terbuka hijau • Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi • Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air • Melakukan penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif • Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada • Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan



Visi RPJMD	SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		secara mandiri	edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup
	Meningkatnya pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber • Memperkuat peran bank sampah, TPS/TPS3R/PDU sebagai fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R untuk sarana edukasi pemilahan, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular • Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing • Mendorong pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam PermenLHK Nomor 75 Tahun 2019 khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi hotel, restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga; dan ritel yang meliputi pusat perbelanjaan, toko, modern, dan pasar rakyat • Melakukan penanganan sampah di hilir meliputi perbaikan sistem pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dengan penerapan sistem terpilah dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R • Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya • Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah • Membangun fasilitas pengelolaan sampah yang meliputi TPST, TPS3R/PDU, dan bank sampah • Mengoptimalkan operasional TPS/TPS3R dan pembangunan RDF Plant di TPST • Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah • Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) • Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah • Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat • Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan • Meningkatkan peran serta produsen khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman dalam pengurangan sampah • Meningkatkan luasan lahan untuk pengelolaan sampah (sanitary landfill) • Monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dari sumbernya



Visi RPJMD	SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		terjadwal, penataan pengolahan sampah di TPA dengan pembangunan RDF Plant dan memperbaiki sistem operasional TPA dari open dumping menjadi LUR dimana hanya residu yang tidak dapat diolah yang dibuang ke TPA	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi• Meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan penatausahaan keuangan• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan• Perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)• Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan• Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
 - c. Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
 - c. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Rehabilitasi
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
 9. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pengelolaan Sampah
 - a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - e. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
 - f. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
- B. URUSAN KEHUTANAN**
1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
 - a. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara, tanah, dan pengelolaan sampah				Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		
		Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu			Persentase kualitas air yang sesuai baku mutu		
			Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Tersusunnya dokumen RPPLH	Prosentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dan/atau ditinjau kembali	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
				Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPP Karst yang ditetapkan	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya dokumen KLHS	Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
				Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan		Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
				Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
			Respons cepat dan penyelesaian pengaduan lingkungan yang efektif		Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya tindak lanjut aduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota ditindak lanjuti	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Meningkatnya kualitas udara			Persentase kualitas udara yang terpantau		
			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan		Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran	Persentase luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Pelaksanaan rehabilitasi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas lahan			Luasan Tutupan Lahan		
			Terlindunginya keanekaragaman hayati dan meningkatnya konservasi ekosistem lokal		Luasan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Terlaksananya pengelolaan kehati	Persentase jumlah pengelolaan kehati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
				Terkelolanya taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan		Persentase Sekolah Adiwiyata	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Terdapat Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota	meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga pendidikan formal/lembaga	
			Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam berperan aktif menjaga lingkungan		Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Terdapat Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui upaya konservasi yang berkelanjutan		Persentase masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
				Terlaksananya pemberdayaan desa melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Luas lahan yang dilindungi	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengelolaan sampah			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		
			Meningkatnya cakupan layanan persampahan dan pengurangan timbulan sampah		Persentase Pengurangan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
				Terkelolanya sampah di Kabupaten Karanganyar	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Pengelolaan Sampah	
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Terlaksananya penanganan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
			Tumbuhnya motivasi masyarakat dalam berperan aktif menjaga lingkungan		Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Terdapat Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3 yang aman dan ramah lingkungan		Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
				Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3	Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai IKM		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang disertai target indikator kinerja dan anggaran disampaikan melalui tabel berikut ini.



Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.101.431.956		28.393.097.156		27.393.097.156		27.893.097.156		29.893.097.156		29.893.097.156
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						39.101.431.956		28.393.097.156		27.393.097.156		27.893.097.156		29.893.097.156		29.893.097.156
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai SAKIP	Nilai masing-masing komponen evaluasi kinerja, yaitu: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%), yang dirangkum menjadi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (AKIP)	angka	75,5	75,6	9.888.453.206	75,7	10.026.705.556	75,9	10.026.705.556	76,1	10.526.705.556	76,3	12.526.705.556	76,5	12.526.705.556



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi jumlah dokumen yang ditargetkan dikali 100%	%	84	84	32.739.400	84	145.951.000	84	145.951.000	84	145.951.000	84	145.951.000	84	145.951.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Doku men	3	3	15.811.300	3	20.604.800	3	20.604.800	3	20.604.800	3	20.604.800	3	20.604.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Doku men	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Doku men	2	2	1.863.500	2	2.546.200	2	2.546.200	2	2.546.200	2	2.546.200	2	2.546.200



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	2	2	2.849.000	2	2.849.000	2	2.849.000	2	2.849.000	2	2.849.000	2	2.849.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	2	2	1.818.000	2	3.100.000	2	3.100.000	2	3.100.000	2	3.100.000	2	3.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	3	3	6.356.000	3	8.034.000	3	8.034.000	3	8.034.000	3	8.034.000	3	8.034.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	1	1	1.541.600	1	106.317.000	1	106.317.000	1	106.317.000	1	106.317.000	1	106.317.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah		%	100	100	8.790.081.306	100	8.323.594.556	100	8.623.594.556	100	8.323.594.556	100	8.623.594.556	100	8.323.594.556
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dalam 1 tahun	Orang/bulan	70	80	8.601.875.556	80	8.052.490.456	80	8.352.490.456	80	8.052.490.456	80	8.352.490.456	80	8.052.490.456
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen		5.500	135.038.800	5.500	164.485.100	5.500	164.485.100	5.500	164.485.100	5.500	164.485.100	5.500	164.485.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan		4	3.948.450	4	4.259.600	4	4.259.600	4	4.259.600	4	4.259.600	4	4.259.600



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun	Doku men	0	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang tersusun	Lapor an		12	49.218.500	12	101.359.400	12	101.359.400	12	101.359.400	12	101.359.400	12	101.359.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset		bulan	12	12	2.311.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah yang tersusun	Lapor an	12	12	2.311.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000	12	2.561.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		%	75	75	28.000.000	75	28.000.000	75	28.000.000	75	28.000.000	75	28.000.000	75	28.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama 1 tahun	Orang	7	7	28.000.000	7	28.000.000	7	28.000.000	7	28.000.000	7	28.000.000	7	28.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup		%	88	88	295.479.500	88	566.757.000	88	566.757.000	88	566.757.000	88	566.757.000	88	566.757.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	10	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	70	70	97.320.900	70	178.636.400	70	178.636.400	70	178.636.400	70	178.636.400	70	178.636.400



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	Paket	6	6	20.571.600	6	20.571.600	6	20.571.600	6	20.571.600	6	20.571.600	6	20.571.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan yang tersedia selama 1 tahun	Doku men	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun	Lapor an	12	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun	Lapor an	12	12	146.875.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis yang tersusun	Doku men	21,000	21.000	2.997.000	21.000	5.000.000	21.000	5.000.000	21.000	5.000.000	21.000	5.000.000	21.000	5.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE yang tersusun	Dokumen	1	1	8.215.000	1	10.049.000	1	10.049.000	1	10.049.000	1	10.049.000	1	10.049.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan yang terlaksana dibagi jumlah pengadaan yang direncanakan	%	100	-	0	100	300.000.000	-	-	100	300.000.000	100	2.500.000.000	100	2.800.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	5	-	0	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Unit	1	-	0	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	1	2.500.000.000	1	2.600.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Unit	-	-	0	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		%	88	88	386.992.000	88	386.992.000	88	386.992.000	88	386.992.000	88	386.992.000	88	386.992.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Laporan	6	6	1.692.000	6	1.692.000	6	1.692.000	6	1.692.000	6	1.692.000	6	1.692.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Laporan	12	12	416.000.000	12	336.000.000	12	336.000.000	12	336.000.000	12	336.000.000	12	336.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersusun	Laporan	8	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun	Laporan	8	8	24.300.000	8	24.300.000	8	24.300.000	8	24.300.000	8	24.300.000	8	24.300.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		%	88	88	272.850.000	88	272.850.000	88	272.850.000	88	272.850.000	88	272.850.000	88	272.850.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	163.050.000	10	163.050.000	10	163.050.000	10	163.050.000	10	163.050.000	10	163.050.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33	49.800.000	33	49.800.000	33	49.800.000	33	49.800.000	33	49.800.000	33	49.800.000
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi selama 1 tahun	Unit	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	560.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	(Jumlah dokumen yang disusun / jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yg seharusnya ada sesuai peraturan) x 100%	%	100	100	254.250.400	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dan/atau ditinjau kembali		%	0	0	0	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH yang tersusun	doku men		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/ kota yang dilakukan peninjauan kembali	Jumlah Dokumen RPPLH yang dilakukan peninjauan kembali	doku men		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan yang tersusun	doku men		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun		%	100	100	254.250.400	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KHLS RPJPD/ RPJMD yang disusun	doku men	1	-	-	-	-	-	0	-	0	1	75,000,000	-	0
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	doku men	1	1	111.199.800	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/ Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resi ko Lingkungan Hidup yang Disusun	jumlah dokumen DIKPLHD dan IKLH yang disusun	doku men	2	2	143.050.600	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu / jumlah parameter keseluruhan	%	50	62,50	652.778.350	65,62	633.197.000	68,90	633.197.000	72,34	633.197.000	75,95	633.197.000	79,75	633.197.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu		%	66	66	569.022.050	67	520.697.000	68	520.697.000	69	520.697.000	70	520.697.000	71	520.697.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun	doku men	3	3	139.785.050	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang tersusun	doku men	1	1	139.343.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang terlaksana	doku men		91	289.894.000	91	310.697.000	91	310.697.000	91	310.697.000	91	310.697.000	91	310.697.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan		%		84	14.233.700	84	42.500.000	84	42.500.000	84	42.500.000	84	42.500.000	84	42.500.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tersedia	Laporan	1	1	14.233.700	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana		%	84	84	69.522.600	84	70.000.000	84	70.000.000	84	70.000.000	84	70.000.000	84	70.000.000
Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	ha	1	1	69.522.600	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan ruang terbuka hijau	Jumlah Luas ruang terbuka hijau	ha	3982,55	3982,55	96.109.200	3982,75	97.300.000	3982,95	97.300.000	3983,15	97.300.000	3983,35	97.300.000	3983,55	97.300.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengelolaan kehati		%	85	85	96.109.200	85	97.300.000	85	97.300.000	85	97.300.000	85	97.300.000	85	97.300.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola dalam 1 tahun	unit	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	unit	1	1	96.109.200	1	77.300.000	1	77.300.000	1	77.300.000	1	77.300.000	1	77.300.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Jumlah perusahaan yang mengelola dan melaporkan LB3 dibagi jml perusahaan yang teridentifikasi mempunyai LB3 x 100%	%	77,50	77,80	7.883.400	78	12.800.000	78,50	12.800.000	79,00	12.800.000	79,50	12.800.000	80,00	12.800.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha		%	80	80	7.883.400	80	12.800.000	80	12.800.000	80	12.800.000	80	12.800.000	80	12.800.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
	penghasil limbah B3															
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik selama 1 th	doku men	44	44	7.883.400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik selama 1 th	doku men	-	0	0	44	12.800.000	44	12.800.000	44	12.800.000	44	12.800.000	44	12.800.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	(jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100%	%	76,9	77	176.284.200	77,5	110.000.000	77,80	110.000.000	78	110.000.000	78,20	110.000.000	78,50	110.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan		%	76,9	77,5	176.284.200	77,5	110.000.000	77,5	110.000.000	77,5	110.000.000	77,5	110.000.000	77,5	110.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	jumlah dokumen lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan	doku men	15	15	140.470.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	50	35.814.200	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	(jumlah sekolah adiwiyata / jumlah sekolah yang telah disosialisasi) x 100%	%	0	25	59.305.900	35	70.500.000	45	70.500.000	55	70.500.000	65	70.500.000	75	70.500.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		%	0	50	59.305.900	50	70.500.000	50	70.500.000	50	70.500.000	50	70.500.000	50	70.500.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pelaksanaan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang terlaksana	dokumen	10	32	18.483.700	32	24.000.000	32	24.000.000	32	24.000.000	32	24.000.000	32	24.000.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat dalam 1 tahun	Orang	50	50	29.936.800	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH	Lembaga	3	3	10.885.400	3	16.500.000	3	16.500.000	3	16.500.000	3	16.500.000	3	16.500.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan t erkait LH	(Jumlah yang mengikuti/ Jumlah yang ditargetkan ikut) x 100%	%	50	52	15.723.000	55	20.000.000	60	20.000.000	65	20.000.000	70	20.000.000	75	20.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH		%	50	52	15.723.000	55	20.000.000	60	20.000.000	65	20.000.000	70	20.000.000	75	20.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Entitas	3	3	15.723.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindak lanjuti	(jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklan- juti / jumlah total aduan lingkungan hidup) x 100%	%	100	100	38.186.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota ditindak lanjuti		%	100	100	38.186.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Ko ta yang ditindaklanjuti /dikelola	Jumlah pengaduan yang ditindaklanju ti/dikelola	penga duan	42	42	38.186.000	42	40.000.000	42	40.000.000	42	40.000.000	42	40.000.000	42	40.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	sanksi	18	0	0	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan sampah	Jumlah pengurangan sampah / jumlah volume timbulan sampah) x 100%	%	0,07	3	27.912.458.300	3,5	17.102.594.600	4	16.102.594.600	4,5	16.102.594.600	5	16.102.594.600	5,5	16.102.594.600
Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Jumlah penanganan sampah/ jumlah volume timbulan sampah x 100%	%	0	0	27.912.458.300	10	17.102.594.600	11	16.102.594.600	12	16.102.594.600	13	16.102.594.600	14	16.102.594.600



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	-	-	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan		dokumen	-	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
	Mengacu pada Jakstrada															
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan , Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Unit	5	3	12.816.924.200	2	900.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Ko ta yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun	Doku men	-	-	0	1	900.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	85	85	204.561.600	90	300.000.000	95	300.000.000	100	300.000.000	105	300.000.000	110	300.000.000



**RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATU AN	BASE LINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11				
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA	Ton	34.674	34.674	14.890.972.500	34.674	14.802.594.600	34.674	14.802.594.600	34.674	14,802,594,600	34.674	14,802,594,600	34.674	14,802,594,600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	(jumlah masyarakat yang diberdayakan /jumlah Masyarakat sekitar tahura)* 100%	%	25	30	21.092.200	35	130.000.000	40	130.000.000	45	130.000.000	50	130.000.000	55	130.000.000
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dilindungi		ha	0,25	0,25	21.092.200	0,25	130.000.000	0,25	130.000.000	0,25	130.000.000	0,25	130.000.000	0,25	130.000.000
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif		Desa	3	3	21.092.200	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000
TOTAL						39.122.524.156		28.523.097.156		27.523.097.156		28.023.097.156		30.023.097.156		30.023.097.156



Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

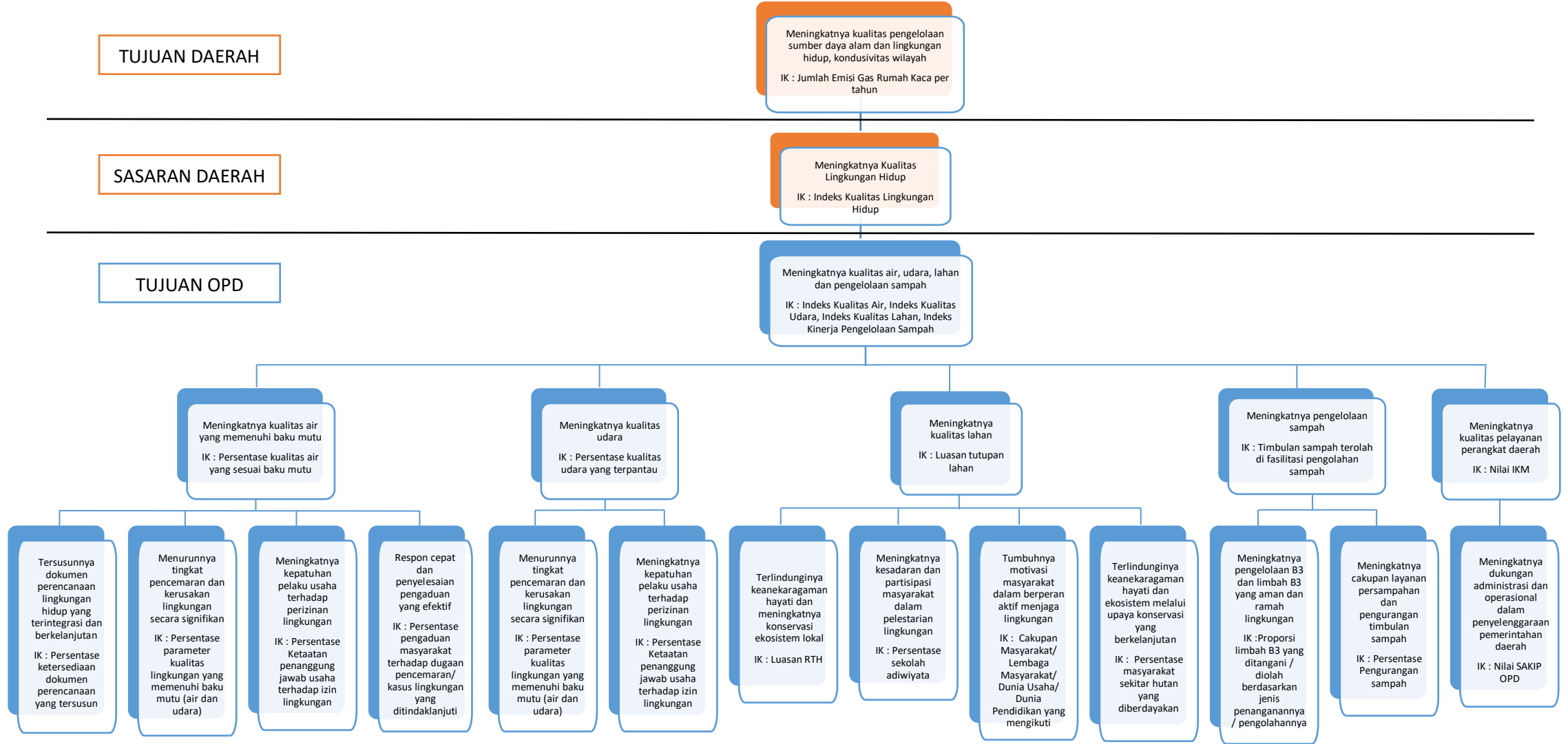
Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket (5)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen lingkungan hidup	<p>A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH <p>B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	<p>A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota <p>B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat <p>C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rehabilitasi 	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Tersedianya ruang terbuka hijau	<p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	<p>Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Terlaksananya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	<p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terbentuknya Sekolah Adiwiyata	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Pengelolaan Sampah - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	

Secara ringkas dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :



Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar



4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama DLH Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama DLH Kabupaten Karanganyar :



Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama DLH

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50	69,32	69,42	69,52	69,62	69,72	69,82
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	91,21	84,61	84,62	84,63	84,64	84,65	84,66
3	Indeks Kualitas Lahan	Angka	65,68	55,12	55,14	55,16	55,18	55,20	55,22
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5
5	Persentase kualitas air yang sesuai baku mutu	%	13,04	13,22	14,33	15,37	16,41	17,45	18,49
6	Persentase kualitas udara yang terpantau	%	8,11	8,27	8,73	9,19	9,65	10,11	10,57
7	Luasan tutupan lahan	ha	55.155,34	55.255	55.455	55.655	55.855	56.055	56.255
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0,07	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
9	Nilai IKM	Angka	87	87,2	87,3	87,4	87,5	87,6	87,7



4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis DLH Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) DLH Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,12	72,40	72,45	72,49	72,54	72,59	72,63



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati baru, khususnya dalam menurunkan potensi dan kejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 memfokuskan pada transformasi digital berbasis data, keamanan informasi, dan penguatan sistem informasi publik, dengan menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
- b. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
- c. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan dalam Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- e. Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Renstra dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup.



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2030, serta menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

